

EDISI : Kamis, 11 April 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Bisnis Bali*

Kategori : *KEUANGAN DESA*

Awasi Dana Desa Pemkab

Kerja Sama dengan Kejari

Singaraja (Bisnis Bali) -

2019.

Guna tersalurnya dana desa yang baik sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menyelenggarakan sosialisasi Program Jaksa Jaga Desa dan Penandatanganan MoU mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, disiplin dan tertib anggaran di Kabupaten Buleleng tahun

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Kejari Buleleng dan diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Buleleng belum lama ini. Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG yang mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T.

Selain itu, sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kes-

epakatan bersama antara Pemkab Buleleng dengan Kejaksaan Negeri Buleleng Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain oleh Kejaksaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya terkait

pengelolaan dana desa serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemkab Buleleng sebagai pihak pertama.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG mengatakan kepala desa harus hati-hati dalam mengelola dana desa. Menurutnya, satu persen pun uang pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia tidak menginginkan ada kepala desa yang tersangkut kasus

karena menyalah gunakan dana desa.

"Kalau semua kepala desa menggunakan dana desa sesuai dengan aturan, semua akan aman," katanya.

Wabup Sutjidra juga menegaskan, kepala desa harus bisa membuat laporan program-program yang sudah dilaksanakan secara rinci. Wabup Sutjidra juga mengatakan, kepala desa tidak usah ragu berkonsultasi dengan Kejari Buleleng.

"Kejari Buleleng pasti akan membukakan pintu

selebar-lebarnya jika ada kepala desa yang ingin berkonsultasi, saya jamin jika semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan pasti aman," tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Wahyudi, S.H., M.H., mengatakan pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel. Wahyudi berpesan, hindari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Ia menginginkan, dana desa betul-betul sampai

ke sasaran untuk pembangunan yang ada di desa. Wahyudi juga mempersilakan bagi kepala desa yang ingin berkonsultasi tentang pengelolaan dana desa.

"Saya berharap seluruh hadirin yang ada disini, bertemulah dengan kami dengan kapasitas sebagai pengacara negara sesuai dengan fungsi kejaksaan yaitu sebagai pengacara negara, yang bisa mendampingi kepala desa. Bukan sebagai penyidik, penyelidik maupun sebagai penuntut umum," pungkasnya. ■ **ira**

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Bisnis Bali

Kategori :

Kerajinan

Kerajinan Tas "Hand Made" tak Kalah Miliki Peluang Pasar

Singaraja (Bisnis Bali) –

Di tengah gempuran tas-tas *branded* yang diproduksi secara massal, jenis tas kreatif yang dibuat oleh para perajin dengan mengangkat tema budaya Indonesia dan dikreasikan secara modern, tetap mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat.

Seperti Dina Sutiawan dari Desa Sambangan Kecamatan

Sukasada, Buleleng, produk kerajinan tas dari berbagai bahan bernuansa kearifan lokal tidak hanya menyasar pasar dalam negeri, eksklusivitas budaya Indonesia yang diaplikasikan pada produk tas kreatif sehingga memberi kesan etnik nan elegan tersebut juga menarik minat pasar internasional.

Ia mengatakan, kerajinan tas

dengan brand Din'z hand made ini dipelajarinya secara otodidak dari sejak setahun lalu. Bermodalkan ide dan kreatifitas sendiri dia mendesain beberapa tas menjadi produk yang tidak pernah ada di pasaran. Untuk bahan baku ia menggunakan beberapa kain kualitas premium seperti endek dan songket, ada juga batik dan kulit. "Pemilihan bahan baku

kita memang priotitaskan yang premium karena kita fokus pada kualitas dan nilai jual seni itu sendiri," jelasnya.

Ia mengatakan, akan produksi apabila ada pesanan (*made to order*) karena dirinya tidak bisa membuat stok dalam jumlah besar mengingat desain dan custom per produk tersebut berbeda dan *limited edition*. "Dalam sebulan

puluhan tas bisa kita produksi itu semua pesanan, dan uniknya dari kesemuanya motifnya tentu berbeda konsumen yang menyukai tas handmade pastinya menginginkan tas yang tidak ada di pasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, kerajinan aneka macam tas ini digelutinya karena masih sedikitnya pemain yang berkecimpung pada ceruk

pasar tas hand made. Sehingga bisa menjadi peluang tersendiri bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke bisnis tersebut seperti dirinya.

"Pesanan tentunya selalu ada namun kami tidak stok karena setiap produk kita punya desain sendiri, jadi kita menerima permintaan sesuai dengan selera pelanggan," imbuhnya. ■ira

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bisnis Bali*

Kategori : *Industri*

Revolusi Industri 4.0 Perkuat Eksistensi Usaha dengan Teknologi

Singaraja (Bisnis Bali) –

Menghadapi era digitalisasi pada Revolusi Industri (RI) 4.0 ini, segenap pelaku UMKM harus makin memperkuat eksistensi usahanya. Walaupun inti dari usaha adalah usaha yang berbasis kearifan lokal atau produk tradisional namun dalam kaitan manajemen pengelolaan usaha harus sudah berangkat menuju model terbaru.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Putu Gede Parma, S.St, Par.M.Par., belum lama ini. Pihaknya mencontohkan terkait pemasaran sudah seharusnya UMKM

melakukannya dengan cara modern seperti pemasaran produk melalui media online atau media sosial, termasuk model *delivery* atau pengantaran produk yang semakin

dimudahkan dengan aplikasi transportasi online yang makin menjamur dewasa ini.

Selain itu hal penting yang harus diperhatikan adalah strategi pengemasan produk yang harus semakin menarik dan kekinian. Itu bukan hanya berarti harus modern, tradisional seperti tren saat ini juga bisa namun juga harus dengan display produk yang *out of the box* atau tidak umum, karena konsumen sekarang cenderung lebih tertarik pada kemasan yang unik dan berbeda bahkan keluar dari pakem.

Menurutnya pasar bebas intinya tidak perlu terlalu ditakuti karena UMKM dengan

spesifikasi produknya tersebut telah memiliki segmen pasar tersendiri. Paradigma yang harus dibangun di benak konsumen pun harus diubah menuju paradigma mendidik konsumen dengan penawaran produk yang menarik.

Mendidik dalam hal ini juga berarti mengajarkan konsumen untuk memiliki kepedulian, semisal kepedulian dengan lingkungan melalui penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan, termasuk mendidik konsumen untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat bagi tubuh untuk jenis produk UMKM seperti kuliner. ■ira

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bisnis Bali*

Kategori : *Imigrasi*

Kantor Imigrasi Singaraja Diharapkan segera Terapkan Sistem Dilan

Singaraja (Bisnis Bali) -

Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG meminta Kantor Imigrasi Singaraja serta seluruh instansi yang ada di Kabupaten Buleleng agar segera menerapkan pelayanan dengan sistem Dilan atau singkatan dari Digital Melayani. Sistem ini adalah suatu kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di mana layanan publik di Indonesia direformasi menjadi bentuk digital.

Hal tersebut diungkapkannya saat mewakili Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST., menghadiri Deklarasi dan Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM) di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Rabu (10/4).

Ditemui se usai acara, Wabup Sutjidra menilai Kantor Imigrasi saat ini sudah mengarah ke pelayanan digital, dan diyakini nantinya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) bisa melayani pengurusan imigrasi dengan sebaik-baiknya. Dilan ini diharapkan agar dilaksanakan di setiap instansi, baik itu instansi vertikal maupun horizontal yang ada di Kabupaten Buleleng. "Sistem dilan ini akan membawa pelayanan yang lebih cepat, efisien dan sudah barang tentu lebih transparan," ujarnya.

Terkait dengan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBM di Kantor Imigrasi kelas II Singaraja, dirinya berharap dengan sudah dideklarasikannya Zona Integritas ini, pelayanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Tentunya terbebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menjadi wilayah dengan birokrasi bersih dan melayani. "Mudah-mudahan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, bisa diterapkan di tempat pengurusan imigrasi singaraja ini," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Singaraja I Gusti Agung Komang Artawan, S.H., M.M. mengatakan dengan pencanangan zona integritas ini kantor Imigrasi Singaraja berkomitmen untuk memberantas KKN dalam hal pelayanan kepada masyarakat berupa paspor. Dia ingin menjadikan momentum ini sebagai fondasi dasar bagi keberhasilan di tahun 2019 serta untuk mencapai target-target yang telah disepakati. "Fakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita dalam mewujudkan kemenkumham, terus beintegrasi, bersinergi dan jauh dari korupsi," pungkasnya. ■ira